

LAPORAN WORKSHOP
RESOLUSI KONFLIK ETNIK DI SUMATERA UTARA
Conflict Resolution Studies Network (CRSN), Universitas Sumatera Utara
Medan, 7-9 Maret 2002

Pendahuluan

Pada 7-9 Maret 2002 Conflict Resolution Studies Network (CRSN), Universitas Sumatera Utara mengadakan workshop Resolusi Konflik Etnik di Sumatera Utara. Workshop ini dimaksudkan untuk menjadi wahana saling tukar gagasan dan perajutan kerjasama dalam upaya mencari resolusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam hubungan antar etnik di Sumatera Utara. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hubungan antar etnik khususnya di daerah Sumatera Utara penting dibahas mengingat kenyataan bahwa daerah ini merupakan satu propinsi di Indonesia yang penduduknya sangat majemuk; dan dengan bercermin dari pengalaman daerah lain yang pernah dilanda konflik etnik patut diduga bahwa potensi konflik serupa sangat mungkin terjadi di daerah Sumatera Utara.

Potensi konflik antar etnik di dalam suatu lingkungan sosial yang majemuk seperti daerah Sumatera Utara sangat dimungkinkan terjadi karena banyak faktor, salah satu di antaranya adalah kompetisi dalam memperebutkan sumberdaya ekonomi dan politik di daerah. Ketimpangan dalam distribusi sumberdaya ekonomi maupun politik, adanya hegemoni atau dominasi suatu kelompok etnik dalam penguasaan sumberdaya publik potensial menjadi faktor-faktor disintegratif yang bisa memicu konflik etnik. Gejala menguatnya faktor-faktor disintegratif tersebut akhir-akhir ini semakin terlihat ketika kebijakan otonomi daerah mulai diimplementasikan, dimana dikotomi penduduk asli dan pendatang, putra daerah dan bukan putra daerah, dan terminologi lain yang mengacu kepada basis-basis primordialisme mengemuka sebagai wacana bahkan didayagunakan dalam proses-proses perebutan penguasaan dan pengelolaan sumberdaya-sumberdaya di daerah (khususnya ekonomi dan politik).

Namun demikian, kita percaya bahwa kondisi kemajemukan masyarakat di Sumatera Utara juga bisa menjadi wahana pembelajaran berdemokrasi. Dengan menumbuhkan sikap saling terbuka, membangun dialog, saling mengapresiasi dan menghormati keberadaan kelompok lain yang berbeda-beda, maka kompetisi dan konflik antar etnik bisa dikelola dengan baik dan dicari mekanisme resolusinya sehingga tidak

menghancurkan tatanan kebangsaan. Meskipun untuk membangun kerjasama dan saling percaya antar komponen masyarakat yang plural bukan sesuatu yang mudah, tetapi kedua hal itu merupakan suatu keniscayaan untuk mengurangi ketegangan dan konflik etnik dan sekaligus menjadi modal sosial yang sangat penting bagi terciptanya masyarakat demokratis.

Workshop ini bertujuan untuk : (1) mendiskusikan secara mendalam hubungan-hubungan antar kelompok etnik di Sumatera Utara dengan semangat terbuka, jujur dan jernih; (2) mencari resolusi konflik etnik dalam kaitannya dengan distribusi dan alokasi sumberdaya ekonomi dan politik dan pemunculan identitas budaya dalam sektor publik; (3) menjadikan forum ini sebagai awal bagi terciptanya komunikasi dari berbagai kelompok etnik yang berlandaskan multikulturalisme, demokratis dan kemanusiaan.

Pembagian Kelompok

Ada tiga isu utama yang akan dibahas dalam diskusi kelompok, yaitu (i) alokasi sumber daya ekonomi dan politik, (ii) simbol dan identitas budaya dalam sektor publik; dan (iii) multikulturalisme dalam wacana demokrasi. Aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan ketiga isu utama tersebut adalah sebagai berikut :

- (I) *Alokasi sumber daya ekonomi dan politik* : (1) peta potensi konflik dalam distribusi sumberdaya ekonomi dan politik dalam masyarakat majemuk di Sumatera Utara (misalnya peluang berusaha, akses informasi, rotasi kepemimpinan dan distribusi jabatan publik); (2) upaya pengendalian potensi konflik yang pernah ada baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat; (3) alternatif resolusi konflik.
- (II) *Simbol dan identitas budaya dalam sektor publik* : (1) potensi konflik dalam ekspresi simbol dan identitas budaya; (2) peran pemerintah lokal terhadap ekspresi simbol dan identitas budaya (termasuk *good practices* yang pernah dilakukan); (3) alternatif pengendalian potensi konflik dalam ekspresi simbol dan identitas budaya.
- (III) *Multikulturalisme dalam wacana demokrasi* : (1) kekuatan dan kelemahan keberagaman etnik dalam menumbuhkan kultur demokrasi; (2) peluang dan hambatan keberagaman etnik dalam menumbuhkan kultur demokrasi.

Ketiga isu utama dengan masing-masing aspek tersebut dibahas dalam tiga level, yaitu pada level komunitas, institusi/organisasi, dan kebijakan. Kemudian dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan konflik maka ketiga isu utama tadi juga akan ditelaah dengan memperhatikan tipe-tipe konflik yang dominan atau gabungan dari sejumlah tipe konflik berikut ini : (a) *konflik hubungan*, yaitu suatu konflik yang muncul karena adanya emosi negatif, mispersepsi, stereotipe, miskomunikasi, atau tindakan negatif yang berulang-ulang yang diwujudkan oleh suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain; (b) *konflik data*, yang mengacu kepada proses pertikaian antar orang/kelompok yang muncul akibat kekurangan informasi yang mendukung dalam proses pembuatan keputusan yang bijak, sehingga menimbulkan pertentangan dan perbedaan-perbedaan prosedur; (c) *konflik kepentingan*, yang muncul disebabkan oleh kompetisi atas kebutuhan yang dipersepsikan tidak sesuai; (d) *konflik struktural*, yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan di luar kelompok; dan (e) *konflik nilai*, yaitu suatu konflik yang disebabkan oleh sistem keyakinan yang tidak kompatibel satu dengan yang lain.

Berdasarkan klasifikasi isu, level dan tipe konflik tersebut di atas kemudian peserta workshop dibagi menjadi tiga kelompok yang dinamakan Kelompok A, B dan C. Masing-masing kelompok membahas ketiga isu utama dengan memfokuskan pembahasan pada level-level tertentu. Kelompok A mendiskusikan isu tersebut pada level Komunitas, kelompok B pada level Institusi/Organisasi, sedangkan Kelompok C membahas isu yang sama pada level Kebijakan.

Rekomendasi

Setelah mendiskusikan alokasi sumber daya ekonomi dan politik, kompetisi simbol budaya dalam ruang-ruang publik, dan multikulturalisme dalam penumbuhan wacana demokrasi pada tingkat komunitas, institusi dan kebijakan, rekomendasi Workshop Resolusi Konflik Etnik di Sumatera Utara adalah :

(1) . Tingkat komunitas

Masalah penguasaan tanah cenderung menimbulkan potensi ketegangan antar etnik. Hubungan antar etnik, terutama antara pendatang dan masyarakat setempat mengalami disharmonisasi karena terjadi dominasi simbol budaya etnik pendatang dalam

hubungan sosial dengan masyarakat setempat. Untuk mengeliminasi disharmonisasi tersebut pendatang seharusnya menghormati budaya etnik setempat. Selain dari itu untuk mengurangi ketegangan antar kelompok etnik diperlukan dialog lintas etnik guna mawadahi proses pembelajaran pengenalan keberagaman kelompok etnik.

(2). Tingkat Institusi

Dalam institusi pemerintahan terjadi konsentrasi jabatan struktural pada kelompok etnik tertentu yang diperkirakan dapat memicu ketegangan antar etnik. Untuk mengurangi potensi ketegangan antar kelompok etnik, rekrutmen pegawai pemerintah dan rotasi kepemimpinan harus berdasarkan prinsip meritokrasi, profesionalisme, keterbukaan dan kecakapan.

Adanya pemakaian simbol budaya yang tidak sesuai dengan kultur area dapat menjadi potensi ketegangan antar etnik. Untuk menghindari potensi ketegangan budaya maka pemakaian simbol-simbol budaya harus disesuaikan dengan kultur area. Sedangkan di tingkat propinsi pemakaian simbol-simbol budaya harus mencerminkan pluralisme budaya.

(3). Kebijakan

Kebijakan pemerintah terutama dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat di satu pihak dan antar kelompok masyarakat di pihak lain. Hal ini bisa terjadi karena kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Untuk menghindari ketegangan tersebut hendaknya pemerintah melibatkan kelompok-kelompok masyarakat (stakeholders) dalam pengambilan keputusan. Multikulturalisme merupakan benih penumbuhan kultur demokrasi, tetapi multikulturalisme masih disikapi sebagai gagasan penghilangan batas-batas ikatan kultural kelompok etnik.